

ABSTRAK

Jeneva Dirgantara Putri: “Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung”

Salah satu penyakit yang kini dirasa sebagai permasalahan yang cukup sensitif untuk dibahas adalah penyakit menular seksual yaitu HIV dan AIDS. Penyakit menular seksual ini terus menjadi ancaman bagi penduduk di Indonesia bahkan didunia. Pemberantasan penyakit menular yang merupakan bagian dari pembangunan kesehatan menjadi perhatian bagi setiap negara. Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bandung dimaksudkan untuk menekan angka kasus pengidap penyakit HIV dan AIDS, menguburkan diskriminasi dan stigma yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang nantinya akan menjadi salah satu hambatan besar dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Ironisnya, riset menunjukkan Kasus HIV/AIDS di Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan sejak 2006 hingga Juni 2019, angka kasus HIV AIDS di Jawa Barat meningkat drastis menjadi puluhan ribu kasus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung, hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipatif masyarakat dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III dengan empat dimensi yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji dengan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung sudah berjalan efektif berdasarkan empat dimensi yaitu 1) komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi namun ada beberapa yang belum optimal. 2) Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi aspek struktur birokrasi yang dimana selaku pelaksana kebijakan belum memiliki SOP khusus. 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah dengan ditetapkannya kriteria pemerintah pelaksana kebijakan yang harus memiliki dedikasi yang tinggi, demokratis, dan jujur dalam menjalankan kebijakan. Kemudian Dinas Kesehatan membentuk dan berkoordinasi dengan forum Warga Peduli AIDS dan melakukan pembagian tugas/peran dengan SKPD atau pihak-pihak yang terlibat seperti dengan KPA, Dinas Pendidikan, Puskesmas.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, HIV/AIDS

ABSTRACT

Jeneva Dirgantara Putri: "Implementation of HIV and AIDS Management Policies in the City of Bandung"

One of the diseases that is now considered a problem that is sensitive enough to be discussed is sexually transmitted diseases, namely HIV and AIDS. This sexually transmitted disease continues to be a threat to the population in Indonesia and even the world. Eradication of infectious diseases that are part of health development is a concern for every country. The HIV and AIDS Prevention Policy at the Bandung City Health Office is intended to reduce the number of cases of HIV and AIDS, bury discrimination and stigma which may lead to human rights violations which will later become one of the major obstacles in the prevention of HIV and AIDS. Ironically, research shows cases of HIV / AIDS in West Java continues to increase every year. Even from 2006 to June 2019, the number of cases of HIV AIDS in West Java increased dramatically to tens of thousands of cases.

The purpose of this study was to determine the implementation of HIV and AIDS prevention policies in the city of Bandung, the obstacles encountered in increasing community participation and efforts in implementing HIV and AIDS prevention policies in the Bandung City Health Office. This study uses the theory of George C. Edward III Policy Implementation with four dimensions, namely: 1) communication; 2) resources; 3) disposition; and 4) bureaucratic structure. This study uses a descriptive method with a qualitative approach to address the issues examined by collecting data through observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques used include the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: 1) the implementation of HIV and AIDS prevention policies in Bandung has been effective based on four dimensions, namely 1) communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, but there are some that are not optimal. 2) Obstacles faced in implementing HIV and AIDS prevention policies include aspects of the bureaucratic structure which as the implementers of the policies do not yet have a specific Standard Operational Procedures. 3) Efforts to overcome obstacles are determined by the criteria of the government implementing the policy which must have high dedication, democratic, and honest in carrying out the policy. Then the Health Office forms and coordinates the AIDS Community Citizens forum and shares the tasks / roles with the SKPD or the parties involved such as the KPA, the Education Office, the Puskesmas.

Keywords: Implementation, Policy, HIV / AIDS